

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri perbankan memiliki peran yang sangat vital bagi kelangsungan perekonomian suatu negara. Salah satu peran utamanya yaitu sebagai lembaga *intermediary* (perantara). Dalam mengemban fungsi perantara tersebut, perbankan melakukannya dengan menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kemudian menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) dalam bentuk kredit (pembiayaan) ataupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa, jenis bank dibagi menjadi dua kelompok yaitu, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau menggunakan prinsip-prinsip syariah terkait dengan jasa lalu lintas pembayaran yang diberikan. Oleh karena itu, sejak tahun 1998 dimulainya sistem perbankan ganda (*era dual banking system*) dengan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan dikeluarkannya UU tersebut, semakin terbukanya kesempatan bagi perbankan yang ingin mendirikan bank syariah maupun mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Oleh karenanya, kinerja perbankan

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah sebelumnya terjadi krisis moneter yang berlangsung sejak bulan Juli 1997.

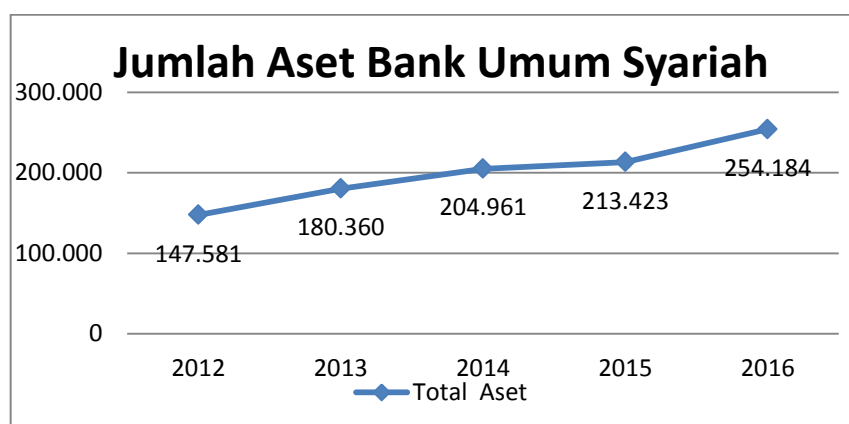
Pada umumnya, kinerja perbankan Indonesia sebelum terjadinya krisis moneter dinilai cukup baik dan menunjukkan kemajuan. Akan tetapi setelah adanya krisis ekonomi, bank-bank konvensional yang saat itu berjumlah 240 bank mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi 16 bank karena kegagalan sistem bunganya, dan sebanyak 7 bank dibekukan operasinya. (Statistika Indonesia, 1998:48). Tingginya suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha. Sehingga, kemampuan sektor produksi menurun. Hal ini menyebabkan kualitas aset perbankan turun secara drastis. Sementara, sistem perbankan konvensional terus diwajibkan memenuhi imbalan kepada depositor sesuai dengan suku bunga pasar. Kondisi ini menjadikan peran perbankan yang sebagai lembaga intermediasi dalam kegiatan investasinya menjadi berkurang, khususnya pada perbankan konvensional.

Di saat bank-bank konvensional mengalami penurunan pendapatan, justru perbankan syariah mengalami keadaan yang sebaliknya. Fenomena ini membuktikan bahwa melalui sistem bagi hasil yang diterapkan, bank syariah mampu bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan suku bunga saat krisis ekonomi terjadi. Sejak saat itulah, perbankan syariah mulai diakui kemampuannya dan muncul sebagai sumber kekuatan baru dalam dunia perbankan nasional (Muharram & Pusvitasari, 2007). Oleh karena itu, dalam hal ini Bank Umum Syariah (BUS) dipilih sebagai objek penelitian.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama dan satu-satunya bank syariah yang beroperasi di Indonesia sampai dengan dikeluarkannya kebijakan perbankan tahun 1998. Sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut, perbankan syariah semakin luas dan terus bertambah. Perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia sebelum tahun 1998 yang hanya satu bank syariah, kini menjadi 13 bank syariah dengan 1.869 jumlah kantor cabang, dan sebanyak 1.207 kantor cabang pembantu pada akhir Desember 2016. (Statistika Perbankan Syariah, 2016: 4). Hal ini disebabkan, karena lebih jelasnya landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Disamping itu, dikarenakan adanya potensi pasar yang mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat, serta masyarakat Indonesia yang perlahan-lahan mulai menggemari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Machmud, 2010: 65).

Gambar I.1

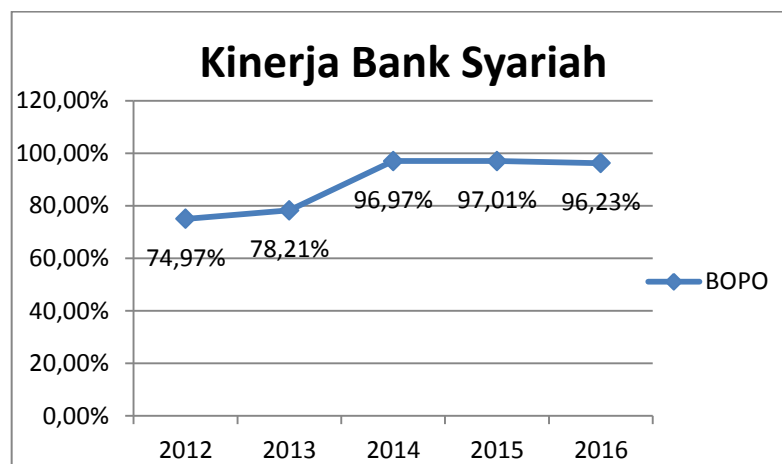
Jumlah Aset Perbankan Syariah
(Nominal dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Statistika Perbankan Syariah Tahun 2012 – 2016

Jika diamati dari segi pertumbuhan aset, pertumbuhan aset BUS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Gambar I.1, telah menggambarkan bahwa jumlah aset BUS periode 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga melewati angka 72%. Berdasarkan grafik terlihat bahwa pada tahun 2012 jumlah aset BUS sebanyak 147.581 Miliar Rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 180.360 Miliar Rupiah, hingga pada tahun 2016 jumlah aset yang dimiliki BUS sebanyak 254.184 Miliar Rupiah. Pertumbuhan jumlah perbankan maupun total aset BUS ini merupakan suatu kebanggaan bagi Perbankan di Indonesia khususnya Perbankan Syariah.

Gambar I.2
Kinerja Bank Syariah



Sumber: Statistika Perbankan Syariah Tahun 2012 – 2016

Akan tetapi, pertumbuhan jumlah perbankan maupun total aset perbankan syariah selama lima tahun terakhir ini, tidak diimbangi dengan tingkat efisiensi perbankan yang baik pula. Gambar I.2 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi yang

dicerminkan oleh perbandingan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang cenderung menurun *trend* nya di tahun 2016. Namun jika diamati dari periode 2012 sampai periode 2016 rasio ini mengalami kenaikan hingga 21,26 persen. Walaupun berdasarkan *trend* nya tahun 2016 mengalami penurunan, tetapi angka persentase rasio ini masih sangat tinggi yaitu sebesar 96,23 persen. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat efisiensi BUS masih rendah dalam mengeluarkan biaya-biaya operasionalnya

Demikian pula dengan rasio *Non Performing Finance* (NPF) periode 2012-2016 yang *trend* nya cenderung menurun. Namun jika diamati dari tahun 2012 tingkat rasio NPF yang hanya sebesar 2,22 persen. Kemudian, terus menerus meningkat ditahun 2013 menjadi 2,62 persen. Lalu pada tahun 2014 terjadi peningkatan secara signifikan sebesar 4,95 persen. Akan tetapi, mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 4,84 persen, kemudian pada tahun 2016 masih mengalami penurunan namun tetap diatas angka 4 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan pada periode 2016, tetapi secara keseluruhan cenderung meningkat jika diamati dari periode 2012. Hal ini membuktikan bahwa dalam mengeluarkan pembiayaannya, BUS masih belum baik serta efisien. Hal ini terbukti dari meningkatnya rasio NPF pada perbankan syariah.

Ascarya & Diana (2008), menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah sendiri, diperlukan adanya pengukuran kinerja melalui ukuran efisiensi, sehingga pada akhirnya tujuan perbankan syariah dapat dicapai. Menurut Purwanto (2011), Indikator efisiensi dapat dilihat dengan memperhatikan besarnya rasio BOPO dan rasio NPF. Kinerja perbankan dapat

dikatakan efisien apabila rasio BOPO dan NPF mengalami penurunan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/7/DPNP Tahun 2013, dijelaskan bahwa setiap bank umum kelompok usaha (BUKU) I dan II memiliki batas rasio BOPO maksimal masing-masing 85% dan 78-80%. Namun, rasio BOPO dirasa kurang tepat dalam menggambarkan tingkat efisiensi suatu bank jika mengingat industri perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menggunakan banyak *input* dan *output* (Firdaus dan Hosen, 2013). Hal tersebut karena perhitungan efisiensi menggunakan rasio BOPO merupakan suatu *partial efficiency*.

Dalam dunia perbankan, efisiensi merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur kinerja bank. Dimana efisiensi sebagai jawaban atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja. Analisis efisiensi perbankan syariah sangat penting karena penghimpunan dan penyaluran pembiayaan secara ekspansif tanpa memperhatikan faktor efisiensi akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang bersangkutan (Muharam dan Pusvitasari, 2007).

Disamping menggunakan perbandingan indikator kinerja bank dan rasio keuangan, efisiensi perbankan dapat pula diukur dengan menggunakan pendekatan frontier, yaitu pendekatan parametrik dan non parametrik. Menurut Nurlela (2015), Pendekatan parametrik meliputi *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA), dan *Thick Frontier Approach* (TFA), sedangkan pendekatan non parametrik dapat diukur menggunakan metode *Data Envelopment Analisis* (DEA). Pendekatan parametrik menghasilkan *stochastic cost frontier* dengan memasukkan *random error*, sedangkan pendekatan non

parametrik menghasilkan *production frontier* dengan tidak memasukkan *random error*.

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah non parametrik, yaitu DEA. DEA menggunakan pemrograman linier untuk mengukur perbandingan rasio *output* dan rasio *input* untuk semua unit yang diteliti menghasilkan skor efisiensi. Alasan ini di dorong adanya pendapat Ascarya & Yumanita (2008), bahwa pendekatan non parametrik memiliki kelebihan yaitu tidak membutuhkan asumsi bentuk fungsi produksi dalam membentuk frontier produksinya. Sehingga, kesalahan dalam spesifikasi fungsi produksi dapat di eliminasi. Keuntungan lain metode ini dibandingkan dengan metode parametrik adalah kita dapat mengidentifikasi unit yang digunakan sebagai referensi (Firdaus dan Hosen, 2013). Hal ini tentunya dapat membantu mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai tingkat efisiensi perbankan menggunakan metode DEA diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Yilmaz dan Gunes (2015) bahwa efisiensi teknis, efisiensi skala, dan efisiensi teknis murni yang diteliti pada bank konvensional dan bank syariah di Turki rata-rata telah dikatakan efisien. Selain itu, penelitian yang dilakukan Nurlela (2015), menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Bank Islam Indonesia selama periode 2011-2013 secara keseluruhan beroperasi secara efisien. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dan Rosyadi (2011), Shahid, dkk (2010), Purwanto (2011), dan Sufian (2006).

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2006), yang meneliti tentang efisiensi bank islam, bahwa tingkat efisiensi bank islam di dunia relatif masih inefisiensi, inefisiensi ini lebih didominasi karena inefisiensi alokasi dari pada inefisiensi teknis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2015), yang meneliti tentang efisiensi bank syariah dan konvensional di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata BUS mengalami inefisiensi biaya, namun efisiensi skala menjadi kontributor utama dalam mencapai tingkat efisiensi teknis. Selain itu penelitian oleh Yudistira (2004), yang menganalisis efisiensi 18 bank syariah di dunia selama periode 1998-1999. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perbankan syariah telah mengalami inefisiensi pada periode 1998-1999. Begitupun dengan penelitian Wahab, dkk (2014), dan Amalia (2013).

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai tingkat efisiensi menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Skor efisiensi yang kemudian dijadikan variabel dependen ini, diperoleh menggunakan perangkat lunak DEAP 2.1 untuk setiap BUS. Hasil skor efisiensi tersebut kemudian akan peneliti analisis.

Sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai tingkat efisiensi bank syariah menggunakan metode DEA. Hasil penelitian yang berbeda ini disebabkan oleh penggunaan beberapa faktor yang memang berbeda, diantaranya metode pengukuran, variabel *output* dan *input*, obyek penelitian, software yang digunakan, pendekatan yang digunakan, dan tahun pengamatannya. Untuk itu, diperlukan

bukti empiris baru terkait ketidakkonsistenan hasil-hasil tersebut. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan variabel *input* (simpanan, aset, dan biaya tenaga kerja/ personalia) dan variabel *output* (pembiayaan dan pendapatan operasional). Pemilihan variabel tersebut berkaitan dengan pendekatan yang digunakan yaitu intermediasi dan kegiatan utama bank syariah sebagai suatu bank. Disamping itu, perbedaan variabel *input* dan *output* sangat menentukan hasil penelitian nantinya.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia: Dengan Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi tingkat efisiensi BUS, yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jumlah kantor dan total aset BUS tidak diimbangi dengan tingkat efisiensi perbankan yang baik pula.
2. Tingkat efisiensi BUS masih rendah dalam mengeluarkan biaya-biaya operasionalnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul mengenai tingkat efisiensi perbankan syariah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel BUS yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode penelitian.
2. Periode pengamatan dilakukan selama 5 tahun, yaitu tahun 2012-2016.
3. Variabel yang diuji meliputi tingkat efisiensi perbankan syariah (Y) sebagai variabel dependen
4. Analisis efisiensi berfokus pada efisiensi teknik (TE) bank selaku lembaga intermediasi keuangan dengan menggunakan beberapa pendekatan faktor *input* dan *output*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dijelaskan oleh peneliti, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada periode 2012-2016?

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, peneliti membagi kegunaan dari penelitian ini menjadi 2 kategori, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya literatur bacaan bagi akademisi, baik dosen maupun mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi kepustakaan mengenai tingkat efisiensi perbankan

bagi peneliti selanjutnya. Dan terakhir, penelitian ini juga memperbaharui hasil penelitian terdahulu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi dunia perbankan untuk memberikan masukan yang berguna terutama faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi agar kinerja perbankan syariah di Indonesia lebih efisien dan kompetitif. Sehingga dapat mengembangkan industri perbankan di Indonesia.

Bagi pemerintah atau regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penelitian sebelum menetapkan kebijakan baru ataupun dalam hal mengevaluasi kebijakan yang telah ada sebelumnya terkait industri perbankan.